

Anggaran Populis

Wahyudi Kumorotomo

Menjelang dimulainya tahun fiskal baru yang mendekati tahun politik, masyarakat akan mendapati banyak alokasi anggaran yang sarat muatan politik. Anggaran populis (*populist budget*) semacam itu tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata karena sekadar mengakomodasi kepentingan dari pemilik otoritas kebijakan. Betulkah, dan apakah yang harus diketahui dan dilakukan oleh masyarakat?

Populisme diartikan sebagai kebijakan yang cenderung menyenangkan khalayak (*crowd-pleasing*) dan meningkatkan popularitas perumus kebijakan, meskipun sering mengabaikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya dan mengorbankan tujuan pembangunan jangka panjang. Dalam buku "*What is Populism?*", Mueller (2016) mengatakan bahwa masalah pokok populisme bukan posisinya yang merupakan anti-tesis elitisme, tetapi klaim bahwa dirinya merupakan satu-satunya yang bisa mewakili rakyat atau menafsirkan kehendak rakyat.

Pertama, klaim sebagai satu-satunya otoritas yang bisa menafsirkan kehendak rakyat akan mudah dipelintir dengan mengatakan bahwa para pesaing politik adalah orang yang tidak pantas dipercaya dan tidak mampu membuat kebijakan terbaik. Donald Trump, misalnya, meraih kekuasaan dengan mengatakan bahwa para elit politik di Washington sebelumnya hanya memperkaya diri-sendiri dan menindas rakyat yang sudah bekerja keras. Pernyataan seperti ini sebenarnya mencederai demokrasi karena menutup ruang untuk memperdebatkan kebijakan publik secara objektif dan terbuka.

Kedua, tokoh populis cenderung menggunakan bahasa simbolik yang memaksakan batas antara mereka yang "pembela rakyat" dan mereka yang bukan. Ketika Nigel Farage, tokoh Inggris yang mendorong Brexit mengatakan bahwa hasil referendum merupakan "kemenangan seluruh rakyat", dia jelas menafikan bahwa ada 48 persen rakyat Inggris yang menentang Brexit.

Dalam hal anggaran, untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekadar bagian dari kebijakan populis, rakyat harus lebih cerdas. Dengan keterbukaan informasi yang telah diperoleh dari sistem yang makin demokratis, masyarakat hendaknya melihat realisasi dari anggaran pada tahun mendatang dengan lebih cermat. Ini berlaku buat APBN maupun APBD. Kenyataan bahwa banyak alokasi anggaran yang tertutup dari pengawasan publik, seperti yang tampak dari alokasi anggaran berskala nasional untuk e-KTP dan penyimpangan proyek infrastruktur publik, hendaknya membuka mata bahwa penggunaan anggaran tidak boleh dibiarkan berlangsung dalam wilayah tertutup.

Dalam penyiapan RAPBD oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta lalu, misalnya, publik terkejut karena hasil pembahasan antara gubernur dan DPRD menghasilkan kenaikan belanja cukup mencolok, dari Rp 74 triliun menjadi Rp 77 triliun, dan banyak diantara usulan kenaikan itu ternyata di luar RKPD. Bantuan kepada Parpol yang sebelumnya hanya sebesar Rp 410 melonjak menjadi Rp 4.000 per suara sah. Reaksi negatif dari warga memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah beberapa alokasi anggaran, meskipun belum semuanya benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Perhatian rakyat juga sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan anggaran daerah pada tahun 2018 mendatang mengingat adanya Pilkada serentak di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota.

Pertama, biasanya alokasi anggaran dimanfaatkan untuk proyek-proyek fisik yang secara umum akan mudah diidentifikasi rakyat seperti jembatan, jalan, taman kota, sekolah, dan sebagainya, di lokasi-lokasi yang strategis. Proyek-proyek yang kasat mata (*tangible*) itu biasanya akan menjadi ciri dari anggaran populis karena sifatnya yang *crowd-pleasing*. Kedua, pejabat petahana biasanya akan menggunakan kegiatan-kegiatan seremonial terkait dengan proyek atau program unggulannya. Sebelum dilarang Bawaslu dan Panwaslu, menjelang Pilkada bahkan sering terjadi kepala daerah yang mencantumkan namanya dalam paket peresmian proyek fisik, drum bantuan aspal, paket sembako untuk orang miskin, dan sebagainya. Ketiga, karena memang dimaksudkan untuk mendongkrak citra pejabat pemerintah, cukup banyak alokasi anggaran daerah yang berada di luar skema PPAS (Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) atau hasil-hasil kesepakatan anggaran publik yang sifatnya jangka-panjang.

Dengan sistem politik yang makin terbuka dan keterlibatan aktif dalam pengawasan atas alokasi anggaran publik, masyarakat kiranya semakin cerdas untuk mengetahui mana saja program atau proyek yang memang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mana yang hanya untuk melakukan pencitraan. Semoga.

Penulis adalah Ketua Pengelola dan gurubesar di MAP-UGM